

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT MENYEPAKATI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2015

Ni Made Dwi Wahyuni¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1),2),3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: oshindw@gmail.com¹, sukmasushanti2gmail.com², aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

Several sanctions by the United States and the European Union have not stopped Iran's action to continue its nuclear development program. A series of meetings by the P5 + 1 group conducted to solve the Iranian nuclear issue. The meeting resulted in a framework agreement called Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The aim of the agreement was to recognize Iran's nuclear rights. This study is devoted to discuss US national interest on JCPOA agreement with Iran. In order to answer the research question, this research uses qualitative method with secondary data source which then analyzed using national interest and US grand strategy concept. The results of this study show the interests for security (vital interest) and interest of maintaining the world order (highly important interest) become the basis of consideration US policy agrees JCPOA agreement.

Keywords: *United State of America, Nuclear, Iran, JCPOA.*

1. PENDAHULUAN

Penguasaan teknologi nuklir oleh suatu negara menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan konstelasi politik dunia. Hubungan internasional menjadi rawan konflik, serta munculnya rasa khawatir pada setiap negara apabila pengembangan teknologi nuklir ini diarahkan untuk tujuan persenjataan (Jan Lodal, 1980). Penguasaan teknologi nuklir tentu saja mempengaruhi hubungan antar negara karena hal ini dianggap sebagai alat "Deterrence" atau lebih pada "Balance of Power" (Morgenthau, 1964). Hal ini dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan pengayaan nuklir yang dikembangkan oleh Iran.

Diawal, Iran menyatakan bahwa pengembangan program nuklirnya yang kian canggih tersebut untuk kepentingan

damai yaitu kebutuhan energi domestik dan kebutuhan dibidang kedokteran. Namun, negara- negara Barat terutama Amerika Serikat yang melihat bahwa pengayaan nuklir Iran sebagai sebuah ancaman (Delpech, 2012). Bagi Amerika Serikat pengembangan nuklir Iran program nuklir Iran itu adalah upaya untuk mengembangkan senjata militer. Kecurigaan AS semakin kuat setelah melihat laporan dari badan urusan nuklir PBB yaitu *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang menyatakan bahwa aktivitas – aktivitas nuklir Iran tidak melampaui studi ilmiah dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh IAEA itu sendiri. (VOA Indonesia, 2015). Amerika Serikat semakin khawatir dan merasa terancam karena program pengayaan uranium yang terus

dikembangkan oleh Iran tersebut didukung oleh negara – negara besar di dunia seperti Rusia dan Cina. Melihat hal itu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi pada Iran dan mengajak negara – negara sekutunya untuk turut bergabung memboikot Iran. Namun, semua upaya tersebut tidak menghentikan langkah Iran untuk tetap melanjutkan pengayaan nuklirnya.

Sehingga kemudian mediasi dilakukan untuk mencari jalan keluar dari isu nuklir Iran tersebut. Mediasi itu melibatkan negara – negara P5+1 yang terdiri dari 5 negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman. Mediasi tersebut menghasilkan suatu kerangka kesepakatan bersama yang disebut *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Kesepakatan itu dicapai di Wina, Austria pada Selasa, 14 Juli 2015 setelah 23 bulan negosiasi intensif antar kedua belah pihak (IRIB, 2015). Fokus utama dari kesepakatan JCPOA adalah untuk membatasi dan menghentikan beberapa fasilitas nuklir utama Iran yang bertujuan untuk menghapus kesalahpahaman tentang agenda damai nuklir Iran dan mencabut sanksi-sanksi berat yang sebelumnya dikenakan terhadap negara ini.

Tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat dengan mudah dicapai karena adanya kendala dari pihak Amerika Serikat yang mana para senat menilai bahwa pengembangan nuklir Iran berbahaya untuk keamanan dan pertahanan Amerika Serikat. Hal itu yang kemudian membuat Presiden Obama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan. Namun kemudian, Amerika Serikat yang sangat

menentang nuklir Iran dan menganggap bahwa pengembangan nuklir Iran sangat mengancam keberadaannya tersebut, pada akhirnya pun menjadi salah satu negara yang menyepakati kesepakatan JCPOA (Iran Politics, 2016). Perubahan sikap AS tersebut terjadi karena adanya kepentingan nasional negaranya terhadap hal itu dan penelitian ini akan membahas kepentingan nasional AS yang mendasari keputusannya bersepakat pada JCPOA.

2. KAJIAN PUSTAKA

Sebuah jurnal dari Anthony Li yang berjudul "*Hopes of Limiting Global Warming? China and the Paris Agreement on Climate Change*". Anthony Li dalam jurnalnya menyatakan bahwa Cina menjadi salah satu sorotan dunia dalam masalah lingkungan, karena negara tersebut telah melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat emisi CO2 tertinggi di dunia. Sedangkan pada kenyataannya, Cina sendiri banyak menunjukkan ketidakseriusan dalam menanggapi isu lingkungan baik di negaranya maupun ditingkat global.

Tetapi kemudian dalam waktu yang begitu lama, Cina akhirnya menyetujui suatu keputusan rencana kerja baru global terkait kerusakan lingkungan yaitu Paris Agreement. Perubahan sikap Cina ini menjadi bahasan Anthony Li dalam jurnalnya ini. Anthony Li menemukan bahwa perubahan sikap Cina pada Paris Agreement dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal yaitu tekanan dari dunia internasional yang membuat Cina sepakat dengan perjanjian tersebut.

Namun disamping itu Anthony Li lebih menekankan bahwa sesungguhnya pertimbangan utama Cina menyepakati Paris Agreement melainkan kepentingan nasionalnya. Seperti yang dinyatakan oleh Anthony Li, bahwa keputusan Cina bersepakat pada Paris Agreement yaitu mengenai kebutuhan Cina untuk meyakinkan dan mempertahankan kepercayaan investor – investor asing agar tetap menjalin hubungan baik dengan negaranya. Apabila Cina menolak meratifikasi kesepakatan terkait climate change tersebut maka Cina akan kehilangan respect dari negara – negara mitra bisnisnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tulisan Anthony Li ini memberikan pemahaman bahwa kepentingan nasional suatu negara menjadi faktor utama negara tersebut menentukan sikap dalam hubungan internasional.

Selanjutnya bahasan yang terkait kepentingan nasional menjadi dasar pertimbangan suatu negara dalam menentukan sikap atau memutuskan kebijakan, juga tersampaikan dalam literatur kedua dari Dennis Nihill dengan jurnalnya yang berjudul *“Labour Migration From Indonesia”* menjelaskan bagaimana isu penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan para majikan Kuwait mendorong pihak Indonesia untuk akhirnya meminta jaminan perlindungan lewat bentuk MoU.

Namun dalam upaya mencapai kesepakatan itu, kedua belah pihak harus melewati negosiasi yang cukup lama karena pada awalnya Kuwait keberatan untuk bersepakat pada MoU tersebut,

sampai pada akhirnya Kuwait bersedia untuk menandatangani. Masalah kekerasan yang dilakukan oleh majikan Kuwait membuat Kuwait akhirnya menyepakati kerjasama bilateral khusus membahas perlindungan TKI. Namun selain itu, kepentingan nasional Kuwait menjadi faktor utama perubahan sikap Kuwait sampai akhirnya bersedia sepakat dengan Indonesia. Kuwait sangat membutuhkan tenaga non profesional dari beberapa negara di dunia dan salah satu yang terbesar adalah dari Indonesia. Kebutuhan Kuwait akan tenaga pembantu atau pelayan dalam memenuhi sector - sektor ekonomi maupun wisata, membuat Kuwait harus mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam melihat tuntutan perlindungan dari Indonesia, yaitu dengan memenuhi tuntutan Indonesia dan meratifikasi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kuwait.

Melalui tulisan ini didapatkan pemahaman yang lebih dalam bahwa kepentingan nasional menjadi faktor utama suatu negara dalam menentukan sikap terhadap suatu kesepakatan atau bekerjasama dengan negara lain. Jika dilihat dari literatur pertama milik Anthony Li, dapat dipahami bahwa pengaruh yang berasal dari luar baik berupa tekanan – tekanan dunia internasional dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam menentukan suatu kebijakan. Namun, diatas itu terdapat hal terpenting yaitu kepentingan nasional yang menjadi pertimbangan utama suatu negara menentukan kebijakan. Sehingga, kedua literatur berkontribusi pada penelitian ini dengan

memberikan pemahaman mengenai konsep kepentingan nasional.

3. METODELOGI PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisa kepentingan nasional AS menyepakati JCPOA. Pendekatannya penelitian ini akan membantu menjelaskan situasi sosial yang ada dengan mendeskripsikan realita yang ada dengan sebenarnya – benarnya, disusun dengan kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang saling berhubungan dari situasi yang alamiah (Satori & Komariah, 2013). Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka atau *library research*.

Oleh karena penelitian ini ingin menganalisa kepentingan AS menyepakati JCPOA maka tingkat analisis penelitian ini adalah negara. Tingkat analisis ini difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam menganalisa kepentingan Amerika Serikat pada kesepakatan JCPOA akan digunakan konsep kepentingan nasional.

Setelah semua data terkumpul, data-data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis data kepustakaan, kemudian memformulasikan secara deskriptif,

selanjutnya memproses data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Intensitas Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir Iran Pra-Kesepakatan JCPOA Tercapai

Pengayaan teknologi nuklir oleh Iran yang mendapat banyak kecaman dari negara – negara didunia terutama Amerika Serikat tersebut sesungguhnya telah di mulai sejak tahun 1956 dan pada saat itu AS justru menjadi mitra kerjasama Iran dalam upaya pengembangan nuklir dengan tujuan damai. Namun, pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam di Iran dan semenjak saat itu segala bentuk kerjasama antara Iran dan AS terhenti termasuk kerjasama pengembangan nuklir itu sendiri (Leverrett, 2010). Dengan adanya revolusi tersebut Iran ingin menghilangkan segala bentuk pengaruh barat di negaranya dan beranggapan bahwa AS merupakan musuh pemerintahan Islam. Sehingga kemudian AS berhenti memasok uranium kepada Iran dan hal itu kemudian diikuti oleh pemerintah Jerman yang juga turut menghentikan bantuannya (Lodal, 1980). Program pengembangan nuklir itu pun kemudian mendapat dukungan dari Rusia dan Cina.

Semenjak saat itu, nuklir Iran menjadi kian canggih sehingga hal itu kemudian memunculkan kecurigaan AS terhadap nuklir yang dikembangkan Iran. Meskipun Iran telah menyatakan bahwa program nuklir yang dilakukannya itu merupakan untuk tujuan damai, namun AS tetap menganggap bahwa program pengayaan

nuklir tersebut merupakan upaya Iran untuk menutupi program pengembangan senjata nuklir (Mustafa, 2000). Sehingga mulai saat itu AS memberikan ancaman - ancaman pada Iran agar Iran menghentikan program pengayaan nuklirnya tersebut. Kecurigaan AS pun bertambah ketika melihat laporan dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa aktivitas - aktivitas nuklir Iran tidak melampaui batas studi kelayakan tidak melampaui batas ilmiah dan banyak ditemukan pelanggaran - pelanggaran aturan pengembangan nuklir yang telah ditetapkan. Kemudian saat itu IAEA meminta Iran untuk menandatangani suatu protokol tambahan yang berisikan tentang pemberian legitimasi IAEA untuk melakukan inspeksi mendadak dan seluas - luasnya pada fasilitas - fasilitas nuklir Iran (Iran Expert, 2005). Namun, Iran menolak untuk menandatangani protokol tersebut.

Sikap Iran tersebut telah menimbulkan respon keras dari komunitas internasional termasuk PBB. Semenjak saat itu DK PBB mengeluarkan serangkaian resolusi yang berisikan perintah untuk Iran agar menghentikan segala bentuk aktivitas nuklirnya (Tide, 2005). Menanggapi hal tersebut Presiden Ahmadinejad menyatakan bahwa ia tidak akan tunduk pada ancaman apapun dan akan tetap melanjutkan program pengayaan nuklirnya. Resolusi ini terbilang kontroversial karena semestinya isu nuklir yang bertujuan damai tersebut hanya cukup ditangani IAEA dan tidak di bawa ke DK PBB. Hal ini juga menunjukkan hipokrisi AS dan sekutunya sehingga DK PBB turut intervensi pada

nuklir Iran ini (Jihad, 2015). Sementara itu, AS turut menjatuhkan sanksi - sanksi berat kepada Iran karena ancaman - ancaman sebelumnya tidak dapat menghentikan upaya Iran untuk mengembangkan program nuklirnya itu (Jihad, 2015). Selain itu AS juga memimpin upaya internasional dalam mempengaruhi kebijakan negara - negara lain untuk turut menjatuhkan sanksi kepada Iran. Sanksi - sanksi internasional tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan internasional dan hal ini cukup mampu mengisolasi Iran dari segala bentuk aktivitas dalam sektor perdagangan internasional maupun sektor - sektor lainnya.

Selama bertahun - tahun, sanksi - sanksi tersebut telah menimbulkan dampak serius pada ekonomi dan masyarakat Iran. Sehingga kemudian semenjak saat itu ketika Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani, Iran memutuskan untuk melakukan negosiasi untuk memperbaiki hubungan dengan barat, terutama AS dan ingin mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia mengenai nuklirnya tersebut. Kemudian menjelang akhir 2013, perundingan mengenai program nuklir Iran yang di kenal dengan kerangka Joint Comprehensive Plan of Action oleh P5+1 yaitu lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis) di tambah Jerman dimulai. Tujuan dari kerangka JCPOA tersebut adalah mengakui hak - hak nuklir Bangsa Iran dengan pengawasan yang ketat dari komunitas internasional dan menjamin agar Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir serta kemudian sebagai imbalan

sanksi internasional atas negara itu akan dicabut (Okezone, 2013).

Namun, tidak demikian dengan AS yang saat itu keberatan untuk menyepakati kesepakatan tersebut. Terkait perjanjian nuklir dengan Iran dalam rangka JCPOA, Obama mendapat penentangan dari kelompok Republik di senat. Mereka menilai bahwa kesepakatan tersebut justru akan memberikan legitimasi kepada Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya yang mengarah pada persenjataan militer (The White House, 2014). Jika itu dilanjutkan untuk kedepannya juga akan membahayakan stabilitas AS dan negara – negara lain (Millard, 2015). Kemudian mereka akan mencabut perjanjian nuklir tersebut dan bahkan berencana untuk menjatuhkan sanksi dan boikot kepada Iran (VOA, 2014).

Penentangan - penentangan tersebut yang menyebabkan perundingan berlangsung cukup lama. Namun kemudian dalam waktu 2 tahun sejak tahun 2013, akhirnya JCPOA berhasil disepakati di Wina, 14 Juli 2015 dan AS menjadi salah satu negara yang menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal ini AS menunjukkan sikap yang berbanding terbalik dari sebelumnya yang sangat menentang dengan keras program pengayaan nuklir Iran, namun kemudian menjadi salah satu negara yang turut menyepakati kesepakatan tersebut.

4.2 Kepentingan Amerika Serikat Menyepakati JCPOA

Perubahan sikap AS tersebut didasarkan pada kepentingan nasional negaranya. Seperti yang dinyatakan

Anthony Li dan Dennis Nihill dalam jurnalnya bahwa kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama suatu negara dalam menentukan atau memutuskan suatu kebijakan. Demikian pula dengan penelitian ini yang ditemukan bahwa terdapat dua kepentingan utama AS yang mendasari keputusannya untuk bersepakat pada JCPOA. Dua kepentingan tersebut adalah yang pertama *defense interest* dan kedua adalah *world order interest*.

4.2.1 Kepentingan akan Pertahanan dan Keamanan dari Ancaman Luar (Defense Interest)

Alasan AS menyepakati JCPOA adalah salah satunya yang pertama terkait keamanan dan pertahanan. Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya mengenai respon pihak oposisi terkait JCPOA, dapat disimpulkan bahwa Obama mendapat tekanan, kritik dan penolakan dari beberapa politisi yang memiliki kedudukan kuat dalam pemerintahannya untuk menolak kesepakatan nuklir JCPOA dengan Iran. Meskipun menerima kecaman itu, Obama masih tetap mendapat dukungan untuk melanjutkan kesepakatan JCPOA tersebut. Dukungan terhadap Obama mayoritas berasal dari rekan satu partainya, yakni Partai Demokrat (Kompas, 2014).

Obama mendapat dukungan dari beberapa politisi kuat dalam pemerintahannya untuk menyepakati kesepakatan nuklir JCPOA dengan Iran. Selain senator - senator dari kelompok Demokrat, menteri luar negeri AS, menteri energi, direktur CIA dan Penasehat Keamanan Nasional turut mendukung

kesepakatan nuklir JCPOA dengan Iran. Dalam dukungannya mereka sangat menekankan pertimbangan pada intensitas kepentingan akan keamanan dan pertahanan di negaranya maupun dunia internasional (*proximity of danger*). Sehingga, langkah untuk berunding dinilai menjadi opsi yang paling baik, mengingat sanksi selama ini tak membuahkan hasil dan Iran tetap pada program nuklirnya bahkan justru berkembang semakin pesat dan akan dapat mengancam keamanan dunia.

Mereka yakin bahwa cara yang paling efektif untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutunya adalah dengan memastikan bahwa diplomasi harus diupayakan sampai berhasil sebelum mempertimbangkan alternatif lebih mahal dan berisiko lainnya (The Hill, 2015). Kesepakatan yang dicapai akan memberi jaminan terbesar bahwa Iran tidak akan diam - diam mengembangkan senjata nuklir tanpa pengawasan. Perjanjian ini dinilai akan menyediakan sarana kuat, lebih komprehensif, dan lebih aman untuk membatasi program nuklir Iran daripada alternatif yang lebih realistis (John Kerry, 2015). Sehingga kerangka kesepakatan JCPOA ini menjadi pilihan terbaik yang tersedia untuk memblokir Iran dari memiliki bom nuklir (Mikulski, 2015). Selain itu akan sangat menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya jika mereka berkomitmen pada kesepakatan nuklir dengan Iran karena kecil kemungkinannya AS dapat kembali membangkitkan kembali sistem sanksi internasional secara efektif. Menurutnya Amerika Serikat akan sendirian

jika keluar dari kesepakatan nuklir dan hal itu tidak akan menguntungkan (Pars Today, 2015).

4.2.2 Kepentingan akan Tatanan Dunia dalam Bidang Keamanan dan Ekonomi (World Order Interest)

Alasan kedua AS sepakat pada JCPOA adalah kepentingannya terkait situasi tatanan dunia baik dalam sektor keamanan maupun perekonomian. Kehadiran Rusia dan Cina yang mendukung JCPOA telah mampu mempengaruhi sikap AS untuk bersepakat pada perjanjian tersebut (*effect on balance of power*). Amerika Serikat tentu menghindari peperangan di antara kekuatan-kekuatan besar tersebut yang mungkin akan merusak perdamaian. Selain itu, sikap negara-negara aliansi AS di Uni Eropa terhadap JCPOA tersebut juga telah mampu mempengaruhi keputusan AS untuk bersepakat pada JCPOA (*attitude allies and friends*). Negara-negara ini menginginkan suatu perdamaian dan keamanan di negaranya maupun kestabilan perekonomian pada negara mereka sendiri. Melihat hal tersebut tentu AS tidak dapat menghindar dari keinginan sekutunya tersebut.

A. Pengaruh Kehadiran Rusia dan Cina dalam Perundingan JCPOA Bagi Amerika Serikat

Rusia dan Cina adalah dua negara besar yang mendukung program pengayaan nuklir Iran dan dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini terus menerus memberikan respon penolakan terhadap pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Iran. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai cara seperti pernyataan

sikap, pembatalan pertemuan dengan negara lain, pertemuan antara menteri dan presiden kedua negara, bahkan pemberian bantuan kepada Iran. Rusia dan Cina sama - sama menganggap bahwa pemberian sanksi justru akan memperburuk keadaan dan jalan yang paling solutif adalah jalan damai melalui perundingan. Berbagai tindakan Rusia dan Cina dalam rangka menolak sanksi lebih jauh yang akan diberikan kepada Iran tersebut, telah berhasil mendesak Amerika Serikat dan komunitas internasional yang menjadi sekutunya untuk menyepakati JCPOA (BNJ, 2017)

Hubungan Rusia - Cina dengan Iran dalam berbagai sektor termasuk sektor militer dan teknologi dianggap akan membahayakan bagi Amerika Serikat dan hal inilah yang juga membuat AS mempertimbangkan JCPOA untuk disepakati. Rusia - Cina akan semakin memperluas pengaruhnya demi kepentingan peningkatan hagemoninya tanpa memperdulikan kepentingan AS pasca sanksi berat yang dijatuhkan kepada Iran. Sebagai negara yang pernah menjadi super power dunia Rusia dan Cina tentunya akan menerapkan *balance of power* yang bertujuan mengimbangi Amerika Serikat. Hal itu juga dilakukan Rusia dan Cina sebagai upaya memperluas hubungan serta pengaruhnya di Timur Tengah untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dalam bentuk perdagangan, keamanan dan hagemoninya di wilayah itu (Cirincione, 2015).

Amerika Serikat melihat kerjasama Rusia - Cina dengan Iran sebagai bentuk *balance*

of power terhadap posisi AS di Timur Tengah. Rusia - Cina menerapkan dua pola *balance of power* sekaligus dalam hubungannya dengan Iran yang akhirnya menjadi pertimbangan Amerika Serikat untuk menyepakati kesepakatan JCPOA. Dalam fenomena ini dapat dilihat bahwa Rusia - Cina menerapkan strategi *hard balancing* dan *soft balancing*. Pola *hard balancing* yang diterapkan Rusia - Cina ditujukan melalui berbagai kerjasama bersama Iran dalam bidang militer lewat hibah dan penjualan senjata. Dengan kepemilikan senjata militer yang mumpuni oleh negara - negara tersebut, tentu akan mempengaruhi sikap AS dalam menyikapi tindakan Rusia-Cina terkait isu nuklir Iran tersebut. Sedangkan pola *soft balancing* diperlihatkan Rusia - Cina dalam posisi mereka pada perundingan nuklir dan menjadi pendukung Iran saat Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menjatuhkan sanksi pada Iran. Strategi - strategi tersebut menghasilkan *effect on balance of power* yang tentu saja mengancam keberadaan dan eksistensi AS terutama di Timur Tengah dan hal itupun juga telah mendorong AS mengambil keputusan untuk bersepakat pada JCPOA. Sehingga, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor AS menuruti kemauan Rusia dan Cina untuk menghentikan sanksi - sanksi yang saat itu dijatuhkan pada Iran dan mulai mempertimbangkan cara - cara damai untuk penyelesaian masalah nuklir Iran dengan bersepakat pada JCPOA.

B. Negara - negara Sekutu Amerika Serikat dan Uni Eropa Sebagai Pertimbangan Amerika Serikat Untuk Menyetujui JCPOA

Pengembangan nuklir yang dilakukan Iran telah menuai banyak kecaman dari berbagai negara dibelahan dunia yang salah satunya adanya partisipasi Eropa dalam pemberlakuan sanksi unilateral terkait nuklir Iran yang diprakarsai Amerika Serikat. Alasan Barat memberlakukan sanksi anti - Iran itu adalah untuk tujuan penekanan terhadap Iran dalam menindaklanjuti program nuklir sipilnya. Program nuklir damai Iran adalah masalah yang sangat ditentang Barat, hingga pada akhirnya menyatukan AS dan Uni Eropa untuk mengambil langkah - langkah anti Iran.

Namun sesungguhnya, Uni Eropa adalah pihak yang paling merugi selama perjalanan sanksi anti Iran. Hubungan Republik Islam Iran dan Uni Eropa dalam lima tahun terakhir menurun drastis, khususnya di sektor perdagangan dan ekonomi (News Hour, 2015). Sehingga ketika dicetuskannya JCPOA, Uni Eropa mewakili negara - negara Eropa yang didalamnya terdapat dua negara pemegang hak veto, yaitu Inggris dan Perancis menekankan bahwa perundingan adalah langkah terbaik, dan diplomasi akan selalu menjadi jalan satu satunya untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Dukungan tersebut dinyatakan oleh Inggris dan Perancis melalui Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri masing - masing negara. Dukungan yang menyatakan hal serupa juga datang dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kanselir Jerman, Sekjen PBB, dan Dirjen Badan Energi Atom

Internasional (Lingkaran News, 2015). Mereka menilai kesepakatan ini merupakan solusi yang dikehendaki karena menyangkut keamanan dan perekonomian negara - negara didalamnya.

Kesulitan - kesulitan dalam hal perekonomian terutama terkait minyak yang membuat Uni Eropa mengupayakan penyelesaian masalah nuklir ini dengan langkah berunding, bukan sanksi dan embargo. Sehingga momen perundingan JCPOA ini dinilai waktu yang tepat untuk berunding dengan Iran, dan Amerika Serikat tidak bisa berpaling dari kemauan sekutunya di Eropa. Keputusan Uni Eropa untuk memilih menyetujui JCPOA menjadi faktor eksternal yang akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk menyetujui JCPOA (IRIB, 2016). Melihat pengaruh *attitude allies and friends* itu, Amerika Serikat tidak memiliki pilihan lain selain ikut menyetujui kesepakatan JCPOA ini. Apabila AS menolak untuk menyetujui, maka keputusannya akan sangat berlawanan dengan kehendak sekutunya di Eropa dan tentu akan mempengaruhi kepercayaan Uni Eropa, PBB dan IAEA terhadap AS (Terence, 2015).

5. KESIMPULAN

Setelah pemaparan mengenai sejarah perkembangan nuklir Iran dan respon Amerika Serikat terhadap hal itu, tentu dapat dilihat bahwa Amerika Serikat sangat menentang pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran tersebut karena program itu diklaim oleh AS sebagai upaya pengembangan senjata nuklir. Sampai akhirnya AS membawa permasalahan ini ke

PBB dan pihak PBB kemudian merespon laporan tersebut dengan mengajukan sebuah kerangka kesepakatan JCPOA terkait pengembangan Nuklir Iran. Tujuan utama dari JCPOA ini sesungguhnya adalah mengakui hak – hak bangsa Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya dengan batasan – batasan tertentu. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan sikap AS sebelumnya yang begitu menentang upaya Iran dalam mengembangkan teknologi nuklirnya. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini tentang apa yang menjadi faktor pendorong AS sehingga akhirnya bersedia untuk menyetujui JCPOA.

Pada kesimpulannya, tercapainya kesepakatan JCPOA ini tidak lepas dari kepentingan nasional AS dan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *defense interest* dan *world order interest* menjadi dua faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan AS terkait perjanjian tersebut. *Defence Interest* merupakan faktor yang selalu menjadi pertimbangan utama Amerika Serikat dalam politik luar negerinya karena faktor ini termasuk dalam kepentingan *vital* AS yang terkait keamanan nasional negaranya bahkan juga keamanan internasional terutama dalam hal ini pada kawasan Timur Tengah. Pasca revolusi, Iran melepaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat dan berkembang menjadi kekuatan baru di Timur Tengah yang menjalin hubungan kuat dengan Rusia dan Cina. Ketika terlepas dari hubungannya dengan AS, ambisi Iran untuk

mengembangkan teknologi nuklirnya meningkat pesat di era Mahmoud Ahmadinejad yang sangat konservatif dan anti Amerika Serikat.

Dengan pertimbangan *defense interest*, Amerika Serikat memutuskan untuk menempuh jalan negosiasi dan bersepakat pada JCPOA demi menghentikan Iran dari upaya mencapai senjata nuklir. Amerika Serikat mengkhawatirkan Iran menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Amerika Serikat ataupun sekutu AS di belahan dunia lainnya terutama sekutunya di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Israel. Jika perjanjian JCPOA tidak disepakati maka hal itu sama dengan membiarkan Iran mengembangkan nuklirnya tanpa pengawasan. Sehingga AS memilih bersepakat pada JCPOA dengan memblokir Iran untuk memiliki senjata nuklir dan yang lebih jauh lagi adalah menghindari terjadinya perang. Jadi, faktor keamanan menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan keamanan disini adalah keamanan pada Amerika Serikat sendiri beserta keamanan sekutunya.

Selanjutnya, *world order interest* menjadi faktor pendorong kedua yang mempengaruhi kebijakan AS menyetujui kesepakatan JCPOA. *World order interest* ini terkait kepentingan membangun tatanan dunia, dan di dalam *US Grand Strategy* tergolong dalam kepentingan *highly important*. Faktor ini mengarah pada tujuan AS yang ingin mempertahankan kepentingan nasionalnya sebagai kekuatan hegemoni utama di Timur Tengah. Kebangkitan Iran dengan kemajuan militernya terutama dalam pengembangan

nuklir yang turut didukung dua negara besar yaitu Rusia dan Cina, membuat AS khawatir Iran dan kedua negara pendukungnya akan mampu menciptakan *balance of power* terhadap Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran itu ada karena selama ini pencapaian atas kemampuan mengembangkan teknologi nuklir dianggap sebagai kemampuan militer tinggi yang mampu mengimbangi kekuatan hegemoni. Amerika Serikat mengkhawatirkan Iran mampu mencapai senjata nuklir dan bahkan membagi teknologi nuklir ini pada sekutu Iran di Timur Tengah yang juga menjadi musuh AS, seperti Hamas, Suriah dan Hizbullah. Kekhawatiran bergesernya *world order* di Timur Tengah pada Iran membuat AS memilih langkah diplomasi lewat JCPOA demi mencegah Iran mengembangkan teknologi nuklirnya.

Selain itu juga alasan AS menyetujui JCPOA adalah terkait kebutuhan para sekutunya terutama Uni Eropa. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga tatanan dunia dalam bidang keamanan dan ekonomi agar tetap stabil. Hal itu dibutuhkan karena semenjak diberlakukannya sanksi-sanksi terhadap Iran, keadaan perekonomian negara – negara Eropa menurun dan hal itu tentu karena Iran sebagai produsen utama minyak bagi negara – negara tersebut. Tidak ingin keterpurukan tersebut berlangsung terlalu lama maka negara – negara Uni Eropa meminta dilakukannya suatu cara damai yaitu negosiasi tanpa lagi adanya sanksi untuk mencari jalan keluar masalah nuklir Iran ini. Sehingga saat dicetuskannya

JCPOA, Uni Eropa begitu sangat mendorong AS untuk turut menyetujui JCPOA. Hal itulah yang juga dinilai menjadi faktor pendorong AS menyetujui JCPOA.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Delpech, T. (2012). *Nuclear Deterrence in the 21st Century, Lessons From the Cold War for a New Era of Strategic Piracy*. RAND Corporation.
- [2]. Iran Indonesian Radio, IRIB World Service. (2016, March 9). "Interaksi Uni Eropa Terhadap Iran". Diakses pada 27 Juni 2017, dari <http://indonesian.tribe.ir/ranah/telisik/item/108272-interaksi-uni-eropa-terhadap-iran>.
- [3]. Iran Indonesian Radio, IRIB World Service. (2012, February 18). "Ban Ki moon: Perundingan Solusi Tunggal Selesaikan Kasus Nuklir Iran". Diakses pada 28 Juni 2017, dari http://indonesian.tribe.ir/iran/teknologi/item/40301Ban_Ki_moon_Perundingan_Solusi_Tunggal_Selesaikan_Kasus_Nuklir_Iran.
- [4]. Iran Indonesian Radio, IRIB World Service. (2012, November 20). "Dirjen IAEA Kedepankan Solusi Diplomatik atasi Isu Nuklir Iran". Diakses pada 01 April 2017, dari <http://indonesian.tribe.ir/iran/politik/item/54320->
- [5]. Iran Indonesian Radio, IRIB World Service. (2014, May 10). "Agitasi Barat Menjelang Perundingan Nuklir Iran". Diakses pada 28 Juni 2017, dari http://indonesian.tribe.ir/editorial/fokus/item/80134-Agitasi_Barat_Menjelang_Perundingan_Nuklir_Iran.
- [6]. Iran Indonesian Radio, IRIB World Service. (2013, March 17). "Eropa Membutuhkan Iran untuk Pembangunan". Diakses pada 28 Juni 2017, dari http://indonesian.tribe.ir/iran/politik/item/60451-Eropa_Membutuhkan_Iran_untuk_Pembangunan.
- [7]. Jihad, A. A. (2015). *Iran And The United States And The New Middle*

- East Settlement*. European Scientific Journal, Vol.2, Hal213
- [8]. Leverett, F., dan Hillary M. L. (2010). *The United States, Iran and the Middle East's New Cold War*. International Spectator, Vol. 45, No. 1
- [9]. Li Anthony (2016). *Hopes of Limiting Global Warming? China and the Paris Agreement on Climate Change*. China Perspective
- [10]. Morghentau, H.J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A Knopf
- [11]. Morghentau, H. J. (1964) *The Four Paradoxes of Nuclear Strategy*. The American Political Science Association. Vol. 58, No. 1
- [12]. Millard, R. (2015, July 15). "World leaders voice relief at Iran nuclear deal". Diakses pada 28 Juni 2017, dari <https://www.yahoo.com/news/world-leaders-voice-relief-iran-nuclear-deal-141113251.html?ref=gs>,
- [13]. Nihill Dennis, Labour Migration From Indonesia.
- [14]. Nuechterlein Donald E. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies, Vol 2 p.248.
- [15]. Pars Today. (2016, June 4). "Moniz: AS Merugi Bila Tidak Mematuhi JCPOA". diakses pada 19 Juni 2017, dari <http://parstoday.com/id/news/world-i10774-moniz-as-merugi-bila-tidak-mematuhi-jcpoa>.
- [16]. Pars Today. (2016, October 6). *JCPOA dan Harapan Iran kepada PBB*. Diakses pada 12 September 2017 <http://parstoday.com/id/news/iran-i22483-jcpoa-dan-harapan-iran-kepada-pbb>
- [17]. Pars Today (2016, Mey 31). *Iran – Rusia Lanjutkan Kerjasama di Bidang Nuklir*. Diakses pada 23 Agustus 2017, dari <http://parstoday.com/id/news/iran-i10399->
- [18]. The White House, Office of the Press Secretary. (2015, August 5). The White House, "Remarks by the President on the Iran Nuclear Deal". Diakses pada 10 Agustus 2017, dari <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/05/remarks-president-iran-nuclear-deal>
- [19]. Terence, P. (2015, September 10). "Pelosi Celebrates Iran Nuke Deal: 'This Is Historic. This Is Grand.'". Diakses pada 18 Juni 2017, dari <http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/pelosi-celebrates-iran-nuke-deal-historic-grand>.
- [20]. The Washington Post - HighBeam Research" (2008). Atomic Team Reports on Iran Probe; No Weapons Research Found by Inspectors.
- [21]. VOA. (2015, April 13). "Partai Republik Terus Kritik Kesepakatan Nuklir dengan Iran". Diakses pada 18 Juni 2017, dari <http://www.voaindonesia.com/a/partai-republik-terus-kritikmccain-kesepakatan-nuklir-dengan-iran/2716291.html>.